

10 Tahun Reformasi



Amien Rais



B.J. Habibie



Denny J.A.



KontraS



KPK

Komis Pemberantasan Korupsi



Mahkamah Konstitusi

BAKTI UNTUK INDONESIA

Enam Ikon Pembawa Tradisi Baru

Kata Pengantar: Mochtar Pabottingi

Fransiskus Surdiasis
Ulin Ni'am Yusron
Rusdi Mathari

“The will of people is the only legitimate foundation of any government” demikian tulis Thomas Jefferson pada 1801. Prinsip dan nilai utama demokrasi terletak pada kemampuan para pejabat yang terpilih untuk melaksanakan kehendak masyarakat. Para pemimpin, dengan demikian, wajib mengetahui apa yang tengah dipikirkan orang-orang yang mereka pimpin. Disanalah terletak justifikasi utama bagi kehadiran polling opini public.¹

Jiwa politik seperti yang ditegaskan oleh Thomas Jefferson di tahun 1801 itulah yang ingin dicapai oleh reformasi Indonesia di tahun 1998. Cita-cita paling dasar dari reformasi adalah memulihkan kembali hak-hak politik masyarakat yang selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru benar-benar dipangkas. Kehadiran partai politik sebagai salah satu instrument penting negara demokratis dibuka selebar-lebarnya. Tidak ada lagi pembatasan yang bersifat politik atas kehadiran sebuah partai politik. Pers kembali tampil sebagai pilar keempat demokrasi, yang selama masa Orde Baru dikebiri perannya hanya sebagai jurnal pembangunan. Pemilu kembali hadir sebagai tonggak demokrasi yang sesungguhnya, bukan sekadar sebuah pesta atau festival lima tahunan seperti yang dialami selama enam kali pemilu Orde Baru. Dua kali pemilu nasional semenjak 1998 dan sejumlah Pilkada semenjak 2005 telah menjadi instrument demokratis bagi perubahan dan pergantian kepemimpinan, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat local.

Ketika memilih untuk menempuh jalan demokrasi, Indonesia pada akhirnya memerlukan pilar lain guna menyanggah demokrasinya. Seperti juga pengalaman Negara demokrasi lainnya, Indonesia memerlukan kehadiran lembaga jajak pendapat. Lembaga ini lazim disebut pilar kelima demokrasi. Pilar ini menjadi penting karena ia bertumpu langsung pada warga Negara yang berdaulat. Lembaga polling, dengan demikian menghadirkan sebuah *demos cratos*, masyarakat yang berdaulat.

¹ Majalah Time, 31 Mei 1968

DENNY J.A :Membangun Tradisi Baru Politik
Bakti untuk Indonesia, Enam Ikon Pembawa Tradisi Baru
(Fransiskus Surdiasis, Ulin Ni'am Yusron, Rusdi Mathari)

Kehadiran lembaga jajak pendapat ikut mengubah cara kerja politik atau setidaknya menjadi pilar utama budaya politik yang baru. Bila dulu politik berpusat pada elit, kini kehendak masyarakatlah yang menjadi episentrum politik. Jajak pendapat menempatkan warga Negara biasa menjadi penjaga demokrasi.

Denny Januar Ali, seorang intelektual yang akrab dipanggil Denny J.A, adalah salah satu tokoh penting yang ikut membangun lembaga jajak pendapat selaku pilar kelima demokrasi Indonesia. Sejak Pemilu 2004 hingga sekarang Denny J.A telah berkiprah dalam dunia jajak pendapat, survey politik untuk praktis pemilu dan belakangan dunia konsultan politik profesional.

Aneka bentuk karya dan keterlibatan ini telah meninggalkan jejak dalam kehidupan politik Indonesia. Denny J.A telah membawa tradisi baru dan sejumlah sumbangan penting bagi kehidupan politik dan demokrasi Indonesia. Pertama, ikut meletakkan dasar bagi bertumbuh, berkembang dan berfungsinya lembaga jajak pendapat sebagai pilar kelima yang menopang kekokohan demokrasi Indonesia. Kedua, menyumbang dan mendorong penerimaan yang luas terhadap survey opini public sebagai instrument penting dalam politik. Ketiga, dalam intensitas yang luar biasa, Denny J.A telah mentransformasikan survey opini public dari arena nasional ke daerah, yang ikut memperkokoh proses demokratisasi di tingkat local. Keempat, membawa tradisi baru konsultan politik professional di Indonesia, yang menyumbang dimensi keahlian dalam cara kerja politik modern.

Membangun Lembaga Polling Professional

Suatu hari di awal tahun 2003, Heri Akhmadi mengajak bertemu Denny J.A. Di sela-sela obrolan ringan hari itu, terbetik satu pertanyaan serius : apa yang bisa dikerjakan untuk memperkuat demokrasi Indonesia yang sebentar lagi bakal menyongsong pemilu keduanya di tahun 2004. Heri Akhmadi adalah salah satu

anggota Tim Keppres kerja sama Indonesia-Jepang. Dari Tim Keppres ia mendapatkan tugas untuk mengeksplorasi program-program politik yang dapat memperkuat demokrasi Indonesia. Sedangkan Denny J.A baru saja menyelesaikan studi doktornya dari Amerika Serikat. Denny J.A lalu mengajukan proposal pendirian sebuah lembaga survey, yang secara khusus dan regular melakukan survey opini public. Dasarnya sederhana. Demokrasi tak hanya memerlukan partai politik yang kuat, tetapi juga lembaga jajak pendapat yang kuat.

Heri Akhmadi sepakat. Obrolan itu kemudian menjadi sejarah. Di tahun itu juga Lembaga Survei Indonesia berdiri, tepatnya pada September 2003. Di sana Denny J.A tercatat sebagai pendiri dan sekaligus pengurus dengan posisi sentral sebagai direktur eksekutif.² Lembaga ini dapat dipandang sebagai lembaga polling opini public pertama di Indonesia dalam pengertian semenjak awal berdirinya memang dirancang dengan tugas utama menyelenggarakan survey opini public secara regular.

Ide utama dibalik pendirian ini Lembaga Survei Indonesia adalah bagaimana memperkuat konsolidasi dan pembangunan demokrasi Indonesia. "Saya melihat perlunya Indonesia memiliki lembaga jajak pendapat yang serius, yang secara berkala melakukan survey opini public, tidak hanya di masa pemilu, tetapi juga dalam proses pemerintahan sehari-hari pasca pemilu,"³ demikian Denny J.A tentang gagasan di balik pembentukan Lembaga Survei Indonesia.

Untuk memperkuat ide ini, Denny J.A berangkat ke Filipina, melihat dan mempelajari salah satu ikon cerita sukses lembaga jajak pendapat di negeri itu, *Social Weather Stations*. SWS punya reputasi yang baik dalam soal kemampuannya

² Lihat akta pendirian Lembaga Survei Indonesia, nomor 15 tanggal 17 September 2003.

³ Informasi ini diambil dari wawancara Denny J.A dengan penulis, bertempat di Kantor Lingkaran Survei Indonesia, Jakarta pada Maret 2008.

meramal hasil pemilu.”⁴ Lembaga ini lahir pada era pasca tumbangya kekuasaan otoriterisme Ferdinand Marcos, tepatnya pada 1985 dengan semangat memperkuat demokrasi di negeri itu.

Sepulang dari Filipina, Denny J.A mewujudkan idenya dengan mendirikan Lembaga Survei Indonesia, yang bernaung di bawah Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia. Tercatat sebagai pendiri yayasan ini antara lain bekas Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan kepala Bappenas Djunaedi Hadisumarto, Kepala Badan Pertanahan Negara Joyo Winoto, pengusaha Theodorus Permadi Rahmat, Denny J.A dan Oentoro Suryo. Kelima nama ini pula yang kemudian tercatat sebagai pendiri Lembaga Survei Indonesia.⁵ Heri Akhmadi sendiri, meski berperan penting dalam mendirikan lembaga ini tak terlibat dalam kepengurusan yayasan maupun Lembaga Survei Indonesia. Alasannya, ia anggota DPR dan pengurus partai politik.⁶

Denny J.A mengadopsi model yang ditempuh *Social Weather Stations*. Pertama, sebuah institusi yang secara khusus mendedikasikan diri di bidang survey opini public. Kedua, guna menopang riset yang regular, lembaga ini mendapatkan sokongan dana dari lembaga dana untuk periode waktu tertentu.⁷ Setelah itu lembaga ini akan dibiarkan mandiri secara financial. Kerangka inilah yang dibawa Denny, J.A ketika mendirikan Lembaga Survei Indonesia.

⁴ Pada Pemilu di Filipina tahun 1992, *Social Weather Stations* secara tepat memperkirakan Fidel Ramos akan keluar sebagai pemenang pemilu. Demikian pula pada pemilu 1998, SWS secara tepat memperkirakan Joseph Estrada akan memenangkan Pemilu Presiden.

⁵ Nama para pendiri ini sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian Yayasan Pengembangan Demokrasi, dengan nomor akta 15 tanggal 17 Juni 2003 dan akta pendirian Lembaga Survei Indonesia dengan nomor akta 28, tanggal 17 September 2003

⁶ Keterangan soal ini didapatkan dalam wawancara dengan Deny J.A. Kedua lembaga dimaksudkan untuk menjadi lembaga yang independen terutama terhadap kekuatan politik. Karena itu Heri Akhmadi tidak yang saat itu menjadi pengurus PDIP dan anggota DPR tidak terlibat dalam kepengurusan.

⁷ *Social Weather Stations* mendapatkan dukungan dana dari Ford Foundation.

Belakangan sejumlah nama ikut memperkuat lembaga ini. Dua nama paling banyak muncul di media : Saiful Mujani dan Muhammad Qodari. Di penghujung 2004, se usai hiruk pikuk pemilu presiden ketiganya memilih jalur berbeda. Saiful tetap di Lembaga Survei Indonesia sedangkan Denny J.A dan Qodari bersama-sama mendirikan lembaga baru bernama *Lingkar Survei Indonesia*. Belakangan, Qodari mendirikan lembaga baru pula, Indo Barometer.

Bersama Lembaga Survei Indonesia, Denny J.A membawa tradisi baru dalam perpolitikan Indonesia dengan menjadikan survey opini public sebagai pilar penting dalam proses politik. Ryass Rasyid, seorang guru besar Ilmu Pemerintahan mengakui, "Dalam pandangan saya, Denny J.A itu telah membawa tradisi baru dalam politik kontemporer Indonesia dengan memperkenalkan metode survey untuk memotret pemilu."⁸ Kehadiran Lembaga Survei Indonesia dengan berbagai hasil surveinya, serta besarnya perhatian dan liputan media atas publikasi hasil tersebut menyuntikkan gairah baru ke dalam kehidupan politik, terutama di seputar pemilu 2004. Pemilu 2004 memiliki konteks politik yang berbeda dengan Pemilu 1999, berupa pemilihan langsung presiden untuk pertama kalinya. Sistem pemilihan langsung membuat politik bergerak lebih dinamis. Ketika politik bergerak dalam irama yang makin dinamis, yang tidak hanya ditentukan oleh kelincahan gerak para elit politik melainkan juga oleh perilaku dan preferensi jutaan warga yang punya hak suara, survey opini public menjadi satu sandaran baru, yang suka atau tidak, cepat atau lambat akan member warna pada kehidupan politik dan pertumbuhan demokrasi Indonesia. Survey hadir sebagai jembatan yang menghubungkan para politisi di satu sisi dengan para pemilih di sisi yang lain.

Denny J.A, baik melalui Lembaga Survey Indonesia dan terlebih lagi melalui Lingkar Survei Indonesia yang didirikannya kemudian hari telah mengubah survey opini public dari kajian akademik menjadi instrument politik dalam pemilu dan

⁸ Majalah *d'Maestro* edisi Desember 2007

penyelenggaraan pemerintahan. Melalui polling opini public, kandidat, partai politik, dan pemerintah memiliki referensi dalam merumuskan langkah dan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Inilah esensi dari politik demokratis dan esensi itulah yang disumbangkan Denny J.A dan lembaga surveinya. Daniel S.Greenberg, editor *Science and Government Report*, mengatakan politik tanpa polling telah menjadi sesuatu yang tidak dapat dibayangkan, ibarat sebuah penerbangan tanpa radar. Melalui kedua lembaga yang ikut didirikannya, Denny J.A telah memberikan sumbangan yang penting: menghadirkan sistem navigasi bagi politik era baru pasca reformasi. Melalui sumbangan ini, Denny J.A ikut menjadi factor atau variable penting dari sebuah transformasi budaya politik dari *political party centered politics* (politik yang berpusat dan mengabdikan pada partai politik dan elitnya) menjadi *voter centered politics* (politik yang berpusat pada aspirasi dan kebutuhan warga Negara).

Dalam pandangan pengamat politik Fachry Ali kehadiran survey telah membuat dunia politik Indonesia menjadi lebih transparan. Survei juga membuat kultur politik lebih rasional, “tidak menggunakan jampi-jampi dan kepul asap kemenyan.”

Fachry setidaknya mencatat dua manfaat yang bisa didapat dari survey. Pertama, bagi pejabat yang tengah menduduki jabatan (incumbent), hasil survey dapat menjadi acuan mengenai posisi dirinya di mata public, misalnya dalam hal kinerja. Kedua, bagi mereka yang baru akan maju dalam pilkada, survey dapat menjadi alat untuk mengukur tingkat popularitas dan dukungan kepadanya. Survei, kemudian menjadi alat baru untuk menilai tingkah laku para elit politik, baik menjelang atau berakhirnya kekuasaan, maupun sepanjang kepemimpinannya.⁹

Di Indonesia, praktik jajak pendapat, terutama yang berkaitan dengan pemilu merupakan tradisi baru dan dapat dikatakan masih berada dalam tahap awal perkembangannya. Hal ini disebabkan terlambatnya praktek ini hidup dalam politik

⁹ “Jadi ‘Dukun Politik’ Lewat Metode Survei”, *Republika*, 27 Februari 2007.

Indonesia. Pada pemilu pertama tahun 1955, praktek ini belum lahir. Dua factor setidaknya menjadi sebab. Pertama, di tengah usia kemerdekaan yang belum panjang, bangsa ini belum menaruh perhatian yang besar pada penguasaan instrument riset, terutama survey opini public. Faktor kedua berkaitan dengan dana. Penelitian opini public memerlukan dana yang tidak sedikit. Ini tentu menjadi hambatan yang serius untuk sebuah republic yang masih berumur muda.¹⁰

Di masa Orde Baru, telah ada lembaga yang melakukan survey opini public, namun survey itu lebih diarahkan untuk merancang pembangunan, dan tidak berhubungan dengan survey opini yang berkaitan dengan pemilu.¹¹ Sistem politik yang dipraktekkan saat itu menjadi alasan utama survey-survei yang berkaitan dengan pemilu tidak pernah dilakukan. Pemerintahan Orde Baru pada dasarnya merupakan suatu regime anti demokrasi yang menabukan upaya elaborasi atas opini public yang berkaitan dengan politik. Seperti dikatakan Wiliam Liddle, sebutan demokrasi merupakan sebuah penipuan yang dilakukan rejim Orde Baru yang menyebut demokrasinya sebagai demokrasi Pancasila.¹² Pemilu tidak lebih sekadar sebagai instrument legitimasi demokratis bagi kekuasaan otoriter Orde Baru. Di tengah situasi seperti ini, survey opini public bukanlah kegiatan yang menarik.

Kedua, meskipun setiap lima tahun sekali Indonesia menyelenggarakan pemilu dan seolah-olah politik berada dalam suasana kompetisi, namun dalam prakteknya Golkar-lah yang selalu keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara di atas 60%. Dalam situasi demikian, jajak pendapat yang salah satu tujuannya adalah memperkirakan siapa yang akan keluar sebagai pemenang pemilu menjadi tidak relevan. Selain itu, pemilihan umum Orde Baru, seperti diutarakan ilmuwan politik

¹⁰ Daniel Dhakidae, "Pemilu, Ramalan, dan Lembaga Jajak Pendapat" artikel opini pada harian *Kompas*, edisi Sabtu, 14 Agustus 1999

¹¹ Jajak Pendapat dan Pemilu di Indonesia, hal. 7-12. Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Survei Indonesia pada 2004

¹² R. Wiliam Liddle, "Rezim: Orde Baru", dalam Donal K. Emerson (editor), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Gramedia, 2001, hal.66

Daniel Dhakidae, bukanlah kesempatan politik yang terbuka, di mana pemilik hak suara dapat menyatakan pilihan politiknya dengan bebas. Dengan demikian, pemilu tidak dapat dipakai untuk meramal, karena perbedaan antara hasrat hati dan kenyataan politik terlalu jauh. Karena terror dan intimidasi yang dijalankan hasil pemilihan umum itu begitu pasti bahwa Golkar akan memenangkan pertarungan, sehingga semua kerja prediksi seperti membuang garam ke laut. Oleh karena itu, jajak pendapat pemilihan umum sama sekali tidak berkembang sepanjang puluhan tahun Orde Baru.¹³

Satu lembaga yang melakukan survey opini public yang penting dicatat pada periode ini adalah PT SUBURI yang berdiri pada tahun 1967. Lembaga ini terutama melakukan jasa survey di bidang pembangunan yang dipesan baik oleh lembaga dan departemen pemerintah maupun lembaga dan kedutaan asing. Usia lembaga ini cuma 5 tahun. Pada tahun 1972, pemerintah mencabut izin PT SUBURI untuk melakukan kegiatannya. Larangan itu dipicu penelitian yang dilakukan pada tahun 1972, guna menjajaki pendapat masyarakat tentang masalah ekonomi dan social. Salah satu pertanyaan dalam survey tersebut adalah penilaian masyarakat tentang sifat kepemimpinan sejumlah tokoh. Dalam urutan tokoh-tokoh yang ditanyakan tersebut, nama Soeharto diletakkan pada urutan ketiga setelah Gubernur Jawa Barat Solihin dan Menko Ekuin Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Survei itu menyulut keributan politik, pemerintah lalu mencabut izin SUBURI selamanya.¹⁴

Pada pemilu 1999, dalam suasana perubahan yang dibawa reformasi, praktek ini kembali marak. Ada lima lembaga yang memainkan peran penting pada pemilu pertama pasca Orde Baru tersebut : RPC (Resource Productivity Center), IFES (International Foundations for Election System), KPP (Komite Pemberdayaan Pemilih) Lab FISIP UI, Litbang Kompas, dan LP3ES (Lembaga Penelitian,

¹³ Daniel Dhakidae, *Social Will, Political Demand, and Public Opinion*, makalah, 1993.

¹⁴ Ulasan atas bagian ini terutama diambil dari buku *Jajak Pendapat dan Pemilu di Indonesia*, Lembaga Survei Indonesia, 2004

Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial). Lembaga yang terakhir ini, LP3ES, patut dicatat sumbangsuhnya. Lembaga inilah yang mulai merintis survey politik yang berkaitan dengan pemilu. LP3ES mulai intens melakukan survey semenjak tahun 1993, mulai dari isu lingkungan, kemudian merambah masuk ke dalam isu-isu dengan bobot politik yang lebih kuat seperti masalah pertahanan, masalah integrasi nasional, nasionalisme, gagasan pemisahan POLRI dan ABRI, terus soal ide pemilihan presiden langsung. LP3ES juga patut dicatat sebagai lembaga pertama yang melakukan *quick count* pada pemilu 1997. Pada pemilu 1999, LP3ES merintis survey tentang pemilu dan aktif melakukan pelatihan polling yang melibatkan berbagai kelompok termasuk wartawan.¹⁵

Kinerja sebuah lembaga jajak pendapat terutama dilihat dari kemampuan mereka membuat prediksi yang akurat dan presisif tentang hasil pemilu. Dari sudut pandang ini, prestasi lembaga jajak pendapat di pemilu 1999 belum memuaskan. Semua lembaga jajak pendapat utama saat itu memang akurat dalam memperkirakan pemenang pemilu, namun gagal dalam memperkirakan komposisi lima besar pemenang pemilu 1999. Patut dicatat, pandangan umum yang bersifat awam saat itu menjagokan PDIP sebagai partai pemenang pemilu. Kelemahan prediksi yang kedua berkaitan dengan presisi perolehan suara. Hanya perkiraan RPC yang mendekati hasil actual perolehan suara PDIP selaku pemenang pemilu. Secara keseluruhan kesalahan absolute rata-rata perkiraan lembaga jajak pendapat ini mencapai 4% ke atas.¹⁶

Pada pemilu 2004 kehadiran lembaga survey makin member warna pada dinamika politik pemilu. Pada tahun inilah Indonesia mencatat sejarah baru : pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Konteks politik ini memberi tempat yang lebih menarik bagi lembaga polling untuk memainkan perannya, terutama dalam memperkirakan peta kekuatan dan peluang masing-masing

¹⁵ Informasi ini terutama diambil dari wawancara Enceng Sohbirin dari LP3ES dengan Ahmad Faisol, Maret 2008 di Jakarta

¹⁶ *Jajak Pendapat dan Pemilu di Indonesia*, LSI, 2004

kandidat presiden. Pendetang baru, namun langsung memainkan peran menonjol pada pemilu ini adalah Lembaga Survei Indonesia.

Lembaga Survei Indonesia memiliki tempat tersendiri dalam soal intensitas dan skala survey yang dilakukannya. Pada pemilu 1999, kebanyakan lembaga-lembaga yang terlibat dalam polling opini public hanya melakukan satu kegiatan penelitian. Polling opini public terutama yang berskala nasional masih merupakan sebuah kegiatan *ad hoc*. Factor biaya menjadi salah satu kendala. Dengan model kegiatan seperti ini, praktek jajak pendapat belum hadir secara optimal guna memotret dinamika pandangan dan pemikiran yang ada di tengah masyarakat. Diperlukan sebuah kegiatan survey yang regular, dengan demikian lembaga jajak pendapat dapat berfungsi secara benar sebagai pilar kelima demokrasi, menjadi sistem saraf utama kehidupan politik, persis seperti yang dikatakan mantan pollster Partai Democrat Amerika Serikat, William R. Hamilton, *polling as the central nervous system of modern political campaigns*.¹⁷

Di tengah situasi ini, Denny J.A dan Lembaga Survei Indonesia mencatat prestasi dengan menyelenggarakan beberapa kali survei opini publik berskala nasional selama pemilu 2004. Kunci suksesnya adalah biaya. Lembaga Survei Indonesia beruntung mendapatkan dukungan financial yang memadai. Eriyanto, mantan peneliti di Lembaga Survei Indonesia, mengungkapkan rata-rata untuk satu kali survey Lembaga Survei Indonesia mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih Rp 400 hingga Rp 600 juta.¹⁸ Lembaga Survei Indonesia sanggup melakukan ini karena mendapat topangan dana dari lembaga Jepang, JICA (Japan International Corporation

¹⁷ Dennis W. Johnson, *No Place for Amateurs: How political Consultant are Reshaping American Democracy*, Routledge, Newyork, 2001

¹⁸ Wawancara penulis dengan Eriyanto, Maret 2008 di Jakarta

Agency).¹⁹ Lembaga inilah yang dari awal membiayai kegiatan survey yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia.

Kinerja jajak pendapat pada pemilu 2004 ini tampak lebih baik dan keandalan prediksinya makin dapat dipercayai. Jika pada pemilu 1999, hasil ramalan lembaga jajak pendapat relative bervariasi yang mengindikasikan belum reliabelnya hasil penelitian, pada pemilu 2004, hasil survey yang dilakukan tujuh lembaga survey saat itu dalam memperkirakan siapa pemenang pemilu dengan komposisinya, serta perolehan suaranya, relative seragam. Semua lembaga²⁰ yang melakukan jajak pendapat saat itu menempatkan Golkar sebagai pemenang, sementara PDIP diperkirakan hanya menempati posisi kedua. Hampir semua lembaga survey juga berhasil menangkap kemajuan PKS dengan menempatkan partai ini dalam kelompok 7 partai peraih suara terbanyak pemilu 2004. Perkiraan perolehan suara PKS patut dicatat sebagai sebuah pencapaian mengingat pada pemilu sebelumnya partai ini masih terbilang partai *gurem* yang tidak lolos *electoral threshold*.

Jika akurasi dan presisi dalam membuat prediksi menjadi kriteria dalam mengukur performance jajak pendapat, maka kredit atas prestasi ini dapat diberikan kepada Lembaga Survei Indonesia. Lembaga inilah yang melalui aneka surveinya memberikan perkiraan hasil yang paling mendekati hasil actual pemilu, baik dari sisi akurasi maupun presisi. Secara keseluruhan deviasi antara perkiraan dan hasil actual pemilu yang diajukan Lembaga Survei Indonesia paling kecil.²¹ Lembaga Survei Indonesia melakukan dua prediksi politik yang penting, yang kemudian terbukti akurat. Pertama, Lembaga Survei Indonesia meramalkan bahwa pemilu akan terjadi

¹⁹ Lembaga Survei Indonesia merupakan bentuk kerja sama Indonesia-Jepang dibawah payung Tim Keppres Kerja Sama Indonesia-Jepang semasa Presiden Megawati. Inilah yang menjelaskan keterlibatan JICA dalam membiayai kegiatan Lembaga Survei Indonesia

²⁰ Lembaga-lembaga yang melakukan jajak pendapat dengan metode wawancara langsung adalah : LP3ES, Balitbang PDIP, Danareksa Research Institute, IFES, International Republican Institute, Lembaga Survey Indonesia, dan Soegeng Sarjadi Syndicated.

²¹ Jajak Pendapat dan Pemilu di Indonesia: Kinerja Lembaga Jajak Pendapat dalam Meramal Hasil Pemilu 1999 dan 2004, diterbitkan oleh Lingkaran Survei Indonesia

DENNY J.A :Membangun Tradisi Baru Politik
Bakti untuk Indonesia, Enam Ikon Pembawa Tradisi Baru
(Fransiskus Surdiasis, Ulin Ni'am Yusron, Rusdi Mathari)

dalam dua putaran dan yang akan masuk ke putaran kedua adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Kedua, lembaga ini juga meramalkan secara akurat bahwa pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla akan menang di putaran kedua. Kedua prediksi ini terbukti benar.

Mempopulerkan Penerimaan terhadap Survei Opini Publik

Malam, 20 Januari 2004, tidak hanya penting bagi Partai Golkar, tetapi juga bagi Denny J.A. Malam itu, bersama timnya dari Lembaga Survei Indonesia, Denny J.A hadir dalam acara Pembekalan dan Orientasi Juru Kampanye Golkar tingkat Nasional Angkatan I di Hotel Santika, Jakarta. Para peserta acara menyambut antusias pemaparan Tim Lembaga Survei Indonesia malam itu tentang temuan survey berkaitan dengan Pemilu 2004. Tentu saja kabar yang paling mereka tunggu adalah prediksi kemenangan Partai Golkar dalam pemilu nanti.

Apa yang terjadi pada malam itu merupakan bagian dari upaya Denny J.A dan timnya di Lembaga Survei Indonesia untuk membuat hasil survey berguna baik bagi partai politik maupun bagi para pejabat pemerintahan. Setelah dua kali survey nasional pada Agustus dan November 2003 tentang Pemilu dan Demokrasi di Indonesia, Denny J.A dan timnya sering mengadakan presentasi kepada partai-partai politik. Bahkan juga kepada para pejabat pemerintah yang berkepentingan dengan data survey. Kegiatan bertajuk *policy dialogue* dimaksudkan agar data hasil survey yang diperoleh mampu mempengaruhi kebijakan public secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, hasil survey juga disosialisasikan lewat konferensi pers, seminar, tulisan lepas peneliti LSI, dan wawancara dengan media.

Antusiasme tak selalu menyertai upaya ini. Tidak semua partai politik atau politisi memandang survey sebagai hal yang penting. Penerimaan partai politik yang

rendah terhadap hasil survey diakui Denny, J.A, “Pertama kali kita membuat survey politik, hasilnya sama sekali tidak ditoleh orang. Saya masih ingat, waktu itu kita ingin audiensi menyampaikan hasil survey kepada partai politik. Respon mereka tak positif. Bahkan dalam banyak kesempatan permohonan kita dialihkan ke tim litbang atau tidak direspon sama sekali. Kini situasi sudah berubah.”²²

Sebagai sebuah inovasi baru dalam kehidupan politik Indonesia, kehadiran survey tidak serta merta diterima secara luas. Padahal di sisi lain, perubahan politik pasca reformasi 1998 telah melahirkan sistem dan kultur baru politik. Perubahan ini di satu sisi menuntut suatu penyesuaian cara kerja politik, yang memungkinkan politik lebih dekat dengan aspirasi masyarakat selaku stakeholder utama kehidupan politik. Di sisi lain, penerimaan terhadap perubahan dan tuntutan cara kerja baru tersebut masih berada pada tahap awalnya. Ada jarak antara kebutuhan di satu sisi, dan penerimaan di sisi lain.

Di tahun-tahun awal reformasi itu, para politisi masih mengerjakan politik dalam cara yang lama, dimana politik terutama dipandang sebagai seni menegosiasikan kepentingan di antara lingkaran elit politik, bukan kemampuan menegosiasikan kepentingan dengan jutaan warga yang punya hak suara dalam sebuah pasar bebas politik. Hasilnya adalah ketidaksesuaian antara apa yang dipikirkan elite politik dengan apa yang dipikirkan public luas. Puncak dari simpangan antara kehendak elite dengan public luas adalah nasib yang dialami oleh Koalisi Kebangsaan yang berdasarkan pemilu parlemen meraup jumlah suara paling besar, namun gagal memenangkan kandidat yang mereka usung. Kelompok ini tetap menganut asas *party centered politics*, sementara kultur baru politik sudah menuntut *voter centered politics*.

²² Denny J.A dalam wawancara dengan Majalah *Men's Obsession*, “King Maker Politik Indonesia”, Majalah *Men's Obsession*, edisi 18 April – 18 Mei 2007

Di tengah suasana itu, Denny J.A memilih membuat terobosan dengan menggelar *road show* mendatangi partai-partai dan tokoh politik. Meski tak semua pihak menyambut antusias, langkah ini patutlah dicatat. *Road show* ini merupakan upaya penting untuk mendorong pertumbuhan penerimaan terhadap survey opini public agar menjadi fondasi penting keputusan partai politik. Ini merupakan upaya untuk mulai mengenalkan sisi keilmiahan terhadap praktek politik. Ikhtiar ini patut dicatat sebagai satu dari sekian bentuk dedikasi Denny J.A guna menjadikan survey sebagai pijakan penting. Langkah ini merupakan cikal bakal ke arah membangun sebuah *research based politics*: politik yang lebih bertumpuh pada pemahaman yang ilmiah terhadap lingkungan politik, terutama voters behavior.

Perlahan-lahan upaya ini membuahkan hasil, terutama ketika Indonesia memasuki era pemilihan langsung kepala daerah. Survei makin diterima dan bahkan telah berkembang ke tahapannya yang penting : menjadi instrument penting dalam keseluruhan kerja untuk memenangkan seorang kandidat. Survey tidak lagi sekadar asesoris tetapi telah menjadi instrument yang terintegrasi dengan proses pemenangan itu sendiri.

Factor kuat penyumbang perubahan penerimaan itu adalah hasil pemilu presiden 2004, yang menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla sebagai pemenang. SBY bukanlah kandidat presiden yang diunggulkan sejak awal. Nama Megawati dan Amien Rais-lah yang pertama beredar dalam bursa calon presiden dan lebih diunggulkan di tahap-tahap awal pemilu 2004. Hasil surveilah yang menangkap kemungkinan SBY dapat duduk di kursi nomor satu negeri ini. Hasil itu terbukti benar.

Denny J.A mengakui, data survey telah memberikan tambahan keyakinan kepada Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju dalam bursa calon presiden. "Saya waktu itu salah seorang yang ikut meyakinkan Pak SBY bahwa dia berpotensi

menjadi presiden,” demikian Denny J.A.²³ Kemenangan SBY membuktikan bahwa survey adalah prediksi yang dapat diandalkan dalam politik.

Hasil ini memberi pengaruh pada tahap berikutnya. Ketika kemudian pemilihan langsung berpindah ke daerah, banyak politisi yang menaruh kepercayaan kepada lembaga survey dan konsultan politik. Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah adalah contohnya. Ismeth Abdullah adalah tokoh politik pertama yang menggunakan jasa Denny J.A selaku konsultan politik professional. Penerimaan Ismeth Abdullah terhadap jasa survey opini public dan konsultan politik merujuk pada pengalaman dan kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono.²⁴ Ismeth Abdullah kemudian memenangkan Pilkada Gubernur Kepulauan Riau. Hasil ini menimbulkan efek bola salju, di mana penerimaan para politisi terhadap survey menggelinding makin lama makin besar.

Denny J.A bukan orang pertama yang membuat survey politik di Indonesia. Survey seperti ini telah muncul jauh sebelumnya, bahkan di era Orde Baru pun sempat ada praktek survey opini public ini. Namun Denny J.A mencatat sumbangan penting dalam mempopulerkan survey politik sehingga survey menjadi kebutuhan partai politik dan dalam perkembangan setelah pemilu 2004 menjadi sentral dalam pilkada. Dalam sebuah kesempatan Denny J.A mengakui, “Saya bukan orang pertama yang membuat survey politik di Indonesia. Namun mungkin saya orang pertama yang mempopulerkannya sehingga survey menjadi kebutuhan partai politik, dan menjadi sentral dalam Pilkada.”²⁵

Memperkuat Demokrasi Lokal

²³ Wawancara penulis dengan Denny JA, Maret 2008

²⁴ Pengakuan ini diberikan Denny JA dalam wawancara dengan penulis, Maret 2008

²⁵ Majalah Men's Obsession, *op.cit.*

DPP Partai Golkar pantas mengenyitkan dahi melihat hasil Pilkada Gelombang Pertama pada Juni 2005. Target 60% kemenangan ternyata jauh dari harapan. Dari 160 daerah yang menggelar Pilkada, Golkar menaruh harapan pada 115 daerah di mana partai ini meraup suara paling besar dalam Pemilu Legislatif 2004. Namun harapan tinggal harapan. Partai berlambang pohon beringin ini hanya mampu meraih kemenangan 38,3%.²⁶

Golkar tidak sendirian. Hampir kebanyakan partai menghadapi kenyataan ini: calon mereka kalah di banyak tempat yang justru menjadi basis mereka, setidaknya berdasarkan perolehan suara pemilu legislative 2004. PDIP misalnya. Di 31 wilayah yang dimenangkan pada 2004, partai ini hanya mampu meraih 12 kemenangan.

Apa yang salah ? Dua partai ini pada dasarnya telah menerapkan mekanisme 'konvensi' dalam rekrutmen kandidat yang akan maju ke arena Pilkada, di mana kandidat yang paling banyak mendapatkan dukungan pengurus partai-lah yang maju. Namun ternyata, dukungan elit partai dalam mekanisme konvensi itu tak segaris dengan dukungan para pemilih. Terhadap pertanyaan ini, para pengamat menilai factor penjelasnya terletak pada kenyataan telah berubahnya karakteristik politik. Dalam pemilu langsung, para pemilih memilih figure yang paling populer, tidak peduli partai mana yang menyokongnya.

Golkar kemudian mengubah strategi. Pada September 2005, partai ini mengganti Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) yang lama dengan Juklak baru bernomor DPP/Golkar/IX/2005. Dalam Juklak yang baru itu, rekrutmen kandidat dimulai dari proses penjaringan yang dilakukan 6 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/ kotamadya yang akan melangsungkan Pilkada melakukan penjaringan dengan mendata calon-calon daerah yang potensial. Nama-nama ini lalu diinformasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Jakarta.

²⁶ Eriyanto, Siasat Partai Politik dan Strategi Pencalonan, Kajian Bulanan Lingkaran Survey Indonesia, nomor 3/Juli/2007

Lima bulan menjelang pilkada, Golkar akan melakukan survey (dengan menunjuk lembaga survey yang independen) untuk mengukur popularitas dan dukungan dari masing-masing calon yang potensial tersebut. Hasil dari survey ini oleh DPP Partai Golkar akan dibuat ranking kandidat yang potensial (dari urutan 1 hingga 5). Nama-nama yang punya potensi menang dalam Pilkada ini diberikan kepada DPD Partai Golkar di daerah agar dilakukan pendekatan.²⁷

Partai ini kemudian memilih menggandeng Denny J.A dengan Lingkaran Survei Indonesia guna untuk melakukan survey dan pemetaan kekuatan kandidat. Denny J.A mengakui dirinya ikut mempengaruhi pimpinan Golkar untuk menggunakan metode survey untuk memilih kepala daerah. “Di depan pengurus Golkar, saya pernah katakan jika Golkar hanya terikat pada konvensi daerah dalam penentuan calon kepala daerah, itu berarti bunuh diri. Di tingkat nasional, metode konvensi terbukti kalah. *Lha kok* metode yang kalah ini dikembangbiakkan di daerah-daerah sebagai metode pemilihan kepala daerah. Mereka yang menang di konvensi Golkar adalah mereka yang populer di tingkat elit belum tentu populer di *grass root*. Kesempatan untuk menang Pilkada menjadi besar jika sudah dijaring melalui survey.”²⁸

Di tahun 2005 itu juga, Denny J.A menanda-tangani kontrak dengan Partai Golkar untuk melakukan survey Pilkada di sembilan propinsi dan 100 kabupaten. Jumlah survey yang dikerjakan ini mencatat rekor tersendiri. MURI mencatatnya sebagai rekor kontrak survey dengan dengan jumlah terbanyak yang dikerjakan satu lembaga.²⁹ Ini merupakan kontrak survey politik pertama antara partai politik dan lembaga survey. Kontrak ini sekaligus menandai penerimaan yang makin luas atas peran sentral survei politik dan opini public sebagai instrument kebijakan dalam proses politik.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wawancara Denny JA dengan Majalah *Men's Obsession*.

²⁹ Situs Lingkaran Survei Indonesia

Hasilnya lumayan memuaskan, setidaknya dalam pengakuan Priyo Budi Santoso, Ketua DPP Partai Golkar. Setelah didampingi Lingkaran Survei Indonesia, kata Priyo, hasil pilkada yang diikuti calon dari partainya lumayan sukses dalam memetakan peluang menang. “Kami menggunakan jasa Lingkaran Survei Indonesia, meski ada yang meleset namun lumayan hasilnya. Survey mereka dijadikan bahan patokan sebelum seorang calon maju dalam pilkada. Jadi tidak lagi bisa mengklaim dirinya paling layak dan berhak untuk mencalonkan diri,” papar Priyo.³⁰

Pilkada yang bermula di tahun 2005 itu menandai tahapan baru sumbangan Denny J.A dalam meletakkan fondasi yang kuat bagi kehadiran dan berfungsinya survey opini public sebagai pilar demokrasi. Setelah pemilu nasional, satu demi satu pemilu daerah digelar semenjak 2005. Indonesia berubah menjadi negeri Pemilu dengan setidaknya puluhan pemilu daerah setiap tahunnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kotamadya. Indonesia memasuki gelombang kedua pemilu yang ditandai oleh bergesernya pentas pemilu dari arena pusat atau nasional ke daerah.

Perubahan ini memerlukan respon tersendiri. Perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah dari dipilih oleh DPRD menjadi dipilih secara langsung dimaksudkan untuk memperkuat sistem politik yang demokratis sekaligus mengembalikan proses politik local ke tangan masyarakat local itu sendiri. Perubahan ini merupakan bagian dari transformasi politik Indonesia guna menyempurnakan sistem demokrasi yang bertumpuh pada pemilihan langsung pejabat public. Dengan sistem yang baru ini, legitimasi utama sekaligus tanggung jawab utama pemerintahan terpilih terletak pada kesanggupannya untuk mendasarkan seluruh kebijakannya pada aspirasi masyarakat.

Bagaimana menempatkan warga negara biasa selaku pemilik suara menjadi pusat politik dan penjaga utama demokrasi dalam medan politik yang baru ini ? Melalui praktek survey opini public yang dilakukannya di berbagai pilkada, Denny

³⁰ Republika, 27 Maret, 2007

DENNY J.A :Membangun Tradisi Baru Politik
Bakti untuk Indonesia, Enam Ikon Pembawa Tradisi Baru
(Fransiskus Surdiasis, Ulin Ni'am Yusron, Rusdi Mathari)

J.A menyumbang landasan yang kokoh bagi kultur baru politik Indonesia yang lebih mengedepankan prinsip *voter centered politics*, dengan cara kerja baru pula: *research based politics and campaign*. Denny J.A ikut memberi sumbangan penting, ikut memperkuat fondasi demokrasi local dengan menempatkan aspirasi public sebagai penggerak utama politik. Hal ini dapat kita pandang sebagai sumbangan Denny J.A bagi proses penguatan praktek jajak pendapat sebagai pilar kelima demokrasi, setelah melakukan hal yang sama di tingkat nasional.

Pada penghujung tahun 2004, tepatnya 23 November 2004, Denny J.A mendirikan lembaga baru, *Lingkar Survei Indonesia*. Ikut mendirikan lembaga ini adalah Muhammad Qodari, rekan Denny J.A semasa di Lembaga Survei Indonesia. Menurut Denny J.A, pendirian Lingkar Survei Indonesia merupakan respons terhadap perkembangan politik yang ada, di mana kepala daerah sekarang dipilih secara langsung. Tahun 2005 merupakan tahun dimulainya rangkaian pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia, baik untuk jabatan gubernur maupun bupati. Dalam satu putaran pemilu (periode 5 tahun) paling tidak ada 33 pemilihan gubernur dan kurang lebih 460 pemilihan bupati dan walikota. Pada tahun 2005 saja menurut data Departemen Dalam Negeri berlangsung 226 pemilihan langsung, baik untuk posisi gubernur maupun posisi bupati atau walikota.

Proses ini memerlukan dukungan. Pertama di tingkat kandidat, dukungan itu diperlukan guna membaca peta dukungan politik, membangun platform politik yang sesuai dengan aspirasi public serta mengubah peta dukungan itu sendiri. Kedua, di tingkat public, dukungan itu diperlukan guna menyuarakan aspirasi mereka ke tengah proses politik. Dengan demikian, para pemilihlah yang akan menentukan warna dari proses politik yang berlangsung. Dua kebutuhan inilah yang menjadi dasar pertimbangan kehadiran Lingkar Survei Indonesia.

Di tengah konteks seperti itulah, maka semenjak awal, dalam akta pendiriannya, Lingkaran Survei Indonesia telah menetapkan survey opini public dan konsultasi politik, sebagai dua kegiatan utamanya.

Lingkaran Survei Indonesia boelh dibilang lahir di saat yang tepat. “Saya datang di saat yang tepat ketika demokrasi mulai bersemi di Indonesia,” demikian Denny J.A. Rangkaian pemilihan langsung kepala daerah melahirkan gelombang demokrasi yang luas di hampir semua daerah yang menuntut suatu cara kerja baru. Lingkaran Survei Indonesia berada tepat di tengah pusaran gelombang itu

Dari sudut perkembangan lembaga survey, kehadiran Lingkaran Survei Indonesia menandai sebuah transformasi. Pertama, survey kini menjadi instrument politik. Kedua, survey opini public tidak lagi sekadar bergerak di area public interest, melainkan telah berkembang menjadi jasa komersial.

Pendirian Lingkaran Survei Indonesia juga merupakan bentuk perwujudan visi Denny J.A bahwa dalam jangka panjang , masyarakatlah yang harus membiayai kerja lembaga survey. Kelangsungan financial dalam jangka panjang, akan sangat menentukan kelangsungan dan kesanggupan sebuah lembaga survey untuk menjalankan fungsinya dengan optimal. Atas dasar visi tersebut, semenjak awal Lingkaran Survei Indonesia mengambil bentuk hukum Perseroan Terbatas dengan sebuah orientasi baru: bersifat professional dan komersial. Orientasi baru ini jelas merupakan sebuah sumbangan tersendiri yang patut dicatat mengingat sebelumnya lembaga survey mendasarkan hidupnya pada bantuan pihak lain.

Melalui Lingkaran Survei Indonesia, Denny J.A makin mempopulerkan penggunaan survey opini public sebagai instrument politik dan membuat survey sebagai bagian integral dari proses politik, terutama proses pemilu. Untuk karyanya itu, Denny J.A mendapat sejumlah penghargaan. Pada tahun 2007, Denny J.A bersama sejumlah tokoh nasional mendapatkan *PKS Award* dari Partai Keadilan

Sejahtera atas jasa-jasa di bidang-bidang tertentu. Denny J.A mendapatkannya atas jasa di bidang riset politik praktis.

Bila di tahun-tahun awal Golkar yang melirik jasa lembaga ini, kini banyak pihak dari berbagai latar belakang partai meminta jasanya. Hingga Maret 2008, Lingkaran Survei Indonesia telah mengerjakan sebanyak 680 survei di berbagai provinsi dan kabupaten. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa dibandingkan dengan apa yang dilakukan lembaga-lembaga sejenis. Lingkaran Survei Indonesia juga telah menyelenggarakan sebanyak 51 *quick count* semenjak 2005 hingga Maret 2008.

Selain aspek jumlah riset, Lingkaran Survei Indonesia mencatat prestasi dalam soal kualitas hasil penelitian dan prediksi yang dibuat, baik dalam hal akurasi maupun presisi, dua hal penting yang memperlihatkan kompetensi sebuah lembaga survey. Lingkaran survey Indonesia mencatat rekor dalam hal *quick count* paling presisi dalam sejarah Indonesia, ketika lembaga ini melakukan *quick count* di Tanjung Jabung Timur di mana selisih dengan hasil actual KPUD hanya sebesar 0,05%. Pada tahun 2005, Denny J.A dan lembaganya mempublikasikan prediksi mereka soal hasil Pilkada di lima wilayah. Prediksi ini diumumkan di sejumlah Koran 10-20 hari sebelum hari pencoblosan. Hasilnya, satu persatu prediksi Lingkaran Survei Indonesia itu tercapai.³¹

Pengumuman prediksi hasil pilkada sebelum hari pencoblosan merupakan langkah dengan taruhan kredibilitas yang penting. Ini dilakukan Denny J.A untuk meyakinkan para politisi dan mendorong penerimaan mereka terhadap tradisi baru survey politik dan opini public sebagai instrument dalam politik praktis di lingkup daerah.

Dengan jumlah dan kualitas riset seperti yang digambarkan di atas, Denny J.A dan Lingkaran Survei Indonesia telah memainkan peran yang penting dalam

³¹ Nama kabupaten dan Koran yang digunakan untuk mengumumkan prediksi tersebut dapat dilihat di website Lingkaran Survei Indonesia, www.lsi.co.id

DENNY J.A :Membangun Tradisi Baru Politik
Bakti untuk Indonesia, Enam Ikon Pembawa Tradisi Baru
(Fransiskus Surdiasis, Ulin Ni'am Yusron, Rusdi Mathari)

membawa praktek survey opini public dari lingkup pemilu nasional ke pemilihan langsung kepala daerah (pilkada). Bergesernya arena survey opini public dari pusat ke daerah menandai satu transformasi penting dalam perkembangan praktek jajak pendapat di Indonesia. Tahun 2005 praktek jajak pendapat atau survey opini public mencatat dua transformasi penting. Pertama, survey opini public bergerak dari area *public interest* ke klien swasta, baik partai politik maupun kandidat perorangan. Kedua, survey opini public bergeser dari lingkup nasional ke lingkup daerah. Kedua perkembangan ini pada dasarnya merupakan perkembangan yang *inevitable, in fact necessary*, sebuah perkembangan yang tidak hanya tak dapat dihindari melainkan juga diperlukan sebagai respons yang rasional atas dinamika politik dengan segala kebutuhan yang dilahirkannya.

Membawa Tradisi Baru Konsultan Politik

Berdirinya Lingkaran Survei Indonesia menandai satu sejarah baru dalam kehidupan politik Indonesia. Lingkaran Survei Indonesia adalah lembaga pertama yang mengibarkan bendera secara formal sebagai lembaga konsultan politik profesional. Dalam akta pendiriannya, Lingkaran Survei Indonesia mencantumkan secara jelas konsultasi politik sebagai salah satu bidang garapan utamanya.

Pendirian Lingkaran Survei Indonesia dan kerja yang dilakukannya di kemudian hari menandai satu sumbangan penting Denny J.A bagi kehidupan politik Indonesia pasca Reformasi: tradisi konsultan politik profesional. Denny J.A telah membawa satu tradisi baru dalam kehidupan politik Indonesia. Melalui profesi ini, Denny J.A memperkaya cara kerja politik Indonesia. Pertama, setelah menyumbang dimensi keilmiahan melalui survey, Denny J.A kemudian menyumbang dimensi *expertise* atau keahlian dalam cara kerja politik. Kedua, sebagai lanjutannya, Denny J.A mempercanggih cara kerja politik dengan mengadopsi sejumlah praktek yang

lazim di lingkungan bisnis seperti strategi media, *positioning* (citra atas kandidat yang hendak dibangun dalam alam kesadaran pemilih), maupun segmentasi.

Kehadiran profesi ini menandai satu transformasi baru dalam cara kerja politik. Politik tidak lagi sekadar sebuah *art*, yang menjadi urusan para politisi yang berinsting tajam, tetapi juga sebuah kerja professional yang menuntut profesionalisme tertentu, di bawah satu istilah: konsultan politik.

Menurut Ryass Rasyid, setiap orang yang mau menjadi pejabat public seharusnya memiliki konsultan politik. Para konsultan politik professional inilah yang akan mencari isu apa yang akan digunakan dalam kampanye, penampilan macam apa yang pantas, bagaimana posisi dan sikap seorang kandidat terhadap isu-isu politik utama yang berkembang dalam satu even pemilu.³²

Kehadiran konsultan politik professional dalam kehidupan politik Indonesia dapat kita anggap sebagai anak kandung reformasi politik 1998. Sejak reformasi berlangsung di Indonesia, sistem politik mulai berubah. Amandemen atas UUD 1945 menghasilkan sistem pemilihan langsung untuk Presiden, Gubernur dan Bupati/walikota.

Penerapan sistem yang baru ini mengubah secara mendasar metode dan kultur kompetisi politik yang berkaitan dengan pemilihan pejabat-pejabat public. Seseorang menjadi presiden, gubernur, walikota bukan lagi ditentukan partai. Mereka terpilih bukan lagi karena petunjuk pejabat, juga bukan lagi dipilih oleh anggota parlemen. Mereka menjadi pemimpin pemerintahan karena dipilih langsung pemilih.

Demokrasi menyediakan mekanisme politik yang kompetitif. Sebagai lanjutannya, politik menjadi tidak pasti. "Siapa yang menang, siapa yang kalah, susah diprediksi. Orang mulai mencari pegangan baru untuk memahami sebab musabab

³² Wawancara Ryass Rasyid dengan penulis, April 2008 di Jakarta

kemenangan dan kekalahan seseorang dalam pemilu yang dipilih langsung,” demikian Denny J.A.³³

Perubahan kultur dan cara kerja politik ini melahirkan satu kebutuhan baru. Dalam wawancara dengan Majalah *Men's Obsession*, Denny J.A mengungkapkan, “Saya melihat ada ruang kosong yang diciptakan oleh era baru ini. Pertama, ilmu untuk membantu banyak pihak memahami perilaku pemilih. Kedua, strategi untuk membantu partai dan calon pemimpin untuk mengubah dukungan pemilih itu. Misalnya, bagaimana membuat calon yang tadinya tidak populer menjadi sangat populer dan kemudian terpilih menjadi dalam pemilihan langsung. Public membutuhkan sebuah jasa baru ini karena situasi politik baru. Pemberi jasa itu disebut konsultan politik.”³⁴

Profesi konsultan politik, dalam pandangan Denny J.A, memberikan saran, pandangan, dan strategi bagaimana harus merespon aspirasi dan harapan pemilih sebaik-baiknya berdasarkan hasil riset yang sangat akurat. Konsultan politik professional menggunakan hasil riset sebagai basis membuat strategi *image building* agar sang tokoh semakin selaras dengan harapan dan aspirasi mayoritas pemilih. Peran sentral konsultan politik adalah bagaimana meningkatkan *electability* dari seorang kandidat. Bila survey diperlukan untuk memetakan dukungan terhadap seorang kandidat, maka jasa konsultan politik diperlukan untuk mengubah peta dukungan tersebut.

Hingga April 2008, Lingkaran Survei Indonesia telah menangani 60 kandidat bupati/ walikota dan gubernur.³⁵ Di sejumlah arena Pilkada penting, Denny J.A dan Lingkaran Survei Indonesia hadir, ikut mempengaruhi prosesnya dan meraih kemenangan. Sebut saja Pilkada Propinsi Banten, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan,

³³ Wawancara Denny JA di Majalah *Men's Obsession*, *op.cit.*

³⁴ *Ibid*

³⁵ Untuk tahun 2008, hingga tulisan ini dibuat, banyak dari kandidat itu yang masih berada dalam proses pemilihan.

tiga pilkada yang mendapat perhatian luas media massa. Di tiga arena pilkada ini, kandidat yang didukung Denny J.A dan lembaganya meraih kemenangan: Ratu Atut Chosyiah di Propinsi Banten, yang merupakan gubernur perempuan pertama, Fauzi Bowo di DKI Jakarta dan Yasin Sahrul Limpo di Sulawesi Selatan. Hingga Maret 2008, Denny J.A telah memenangkan delapan gubernur dan 21 bupati dan walikota. Para politisi pengguna jasanya menyebar luas di lima pulau besar Indonesia. Hingga saat ini, angka ini merupakan jumlah kemenangan terbesar yang dicapai oleh satu lembaga dalam satu putaran pemilu (*election circle*) di Indonesia. Kiprah ini patutlah dicatat sebagai satu sumbangan yang pada akhirnya baik langsung maupun tidak, ikut memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia di tingkat local. Pencapaian ini menempatkan Denny J.A sebagai salah satu orang paling berpengaruh dalam proses Pilkada di Indonesia. Majalah *Men's Obsession* menyebutnya sebagai "King Maker Politik Indonesia".³⁶

Kepeloporan Denny J.A di bidang konsultan politik professional bukan tanpa kritik. Sebagian kalangan berpendapat, bahwa lembaga survey public dan konsultan politik merupakan dua entitas yang harus dipisahkan agar keduanya dapat berfungsi secara optimal tanpa merugikan kepentingan public. Effendy Ghazali dari Universitas Indonesia mengkritik kiprah Lingkaran Survei Indonesia memadukan survey dan jasa konsultasi, merujuk pada pengalaman Amerika Serikat, kedua hal ini harusnya dipisahkan. Enceng Sobirin dari LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) mengungkapkan kemungkinan munculnya bias kepentingan bila dua jasa ini, survey dan konsultan politik, dikerjakan oleh lembaga yang sama.³⁷

Eduard Depari, Public Relations consultant dan staf pengajar di Universitas Pelita Harapan, Jakarta, ikut menyuarakan kritik. Baginya Denny J.A adalah figure yang controversial. Di bisnis barunya, dia memakai dua baju: peneliti, yang

³⁶ Majalah *Men's Obsession*, *op.cit*

³⁷ "Menikmati Kue Demokrasi Lewat Survei" *Koran Tempo*, 5 Mei 2006

mengharuskannya bersikap obyektif, dan konsultan, yang menuntutnya membela klien mati-matian. “Kalau tidak hati-hati, bisa terjadi penyesatan public. Masyarakat bingung dia berbicara sebagai siapa,” tandas Depari.³⁸

Di sisi lain, Denny J.A berpandangan bahwa menggabungkan dua fungsi ini dalam satu payung kelembagaan tidak akan membawa masalah. Keduanya justru saling mendukung. Seperti dikatakan salah satu peneliti di Lingkaran Survei Indonesia, Eriyanto, sebuah lembaga survey tidak harus menjadi konsultan politik. Namun sebuah konsultan politik memerlukan survey professional sebagai dasarnya. Denny J.A sendiri mengakui, bagi seorang kandidat yang bertarung dalam pemilu, sekadar memberi peta dukungan seperti yang dihasilkan survey tidak lagi memadai. Lebih jauh dari itu adalah kebutuhan untuk mengubah peta dukungan tersebut: mempertahankan dukungan yang sudah tinggi atau meningkatkan dukungan yang masih rendah. Aspek kedua inilah yang diberikan oleh konsultan politik professional.³⁹ Menurut Ryass Rasyid, dalam konteks Indonesia, sejauh tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemisahan antara survey dan konsultan politik, praktek ini tidak menjadi soal, asal profesionalisme dan tanggung jawab kepada public menjadi pegangan utama.⁴⁰

Bila di Indonesia profesi ini masih merupakan sebuah tradisi baru, tidak demikian halnya di Negara dengan praktek demokrasi yang sudah panjang usianya. Dalam kehidupan politik di Amerika Serikat, profesi konsultan politik sudah menjadi sebuah tradisi yang mengakar kuat. Kehadiran konsultan politik telah menjadi bagian yang integral dengan kehidupan masyarakat Amerika Serikat, sama pentingnya dengan media dan uang. Profesi ini secara terang benderang bisa ditelusuri hingga ke tahun 1933. Pada tahun ini, di California, Amerika Serikat, Clem Whitaker and Leone Baxter mendirikan *Campaigns, Inc*, yang dianggap cikal bakal konsultan politik

³⁸ “Layanan Hebat untuk Calon Pejabat” *Warta Ekonomi*, 27 Juni 2007

³⁹ Denny J.A dalam wawancara dengan penulis, di kantor LSI Jakarta, Rabu, 20 Maret 2008.

⁴⁰ Wawancara Ryass Rasyid dengan penulis di Jakarta pada April 2008

modern. Perusahaan ini kemudian menjadi model awal bagi bisnis konsultan politik modern dalam bentuknya yang dikenal sekarang.

“Saya alihkan profesi ini ke Indonesia. Di era Orde Baru, tentu saja profesi konsultan politik tak berkembang karena tidak ada pemilihan pemimpin yang benar-benar bebas dari dan dipilih langsung oleh rakyat,” demikian pengakuan Denny J.A. Indonesia kemudian mulai bersentuhan dengan kehadiran professional politik.

Lingkaran Survei Indonesia mengambil bentuk Perseroan Terbatas, karena semenjak awal lembaga ini dimaksudkan sebagai penyedia jasa professional baik untuk riset maupun konsultasi politik, yang harus membiayai seluruh operasionalnya dari jasa yang diberikan. Pilihan ini didasarkan kepada pandangan bahwa sudah saatnya lembaga riset tidak lagi tergantung pada bantuan pihak lain. Perkembangan baru dalam kehidupan politik Indonesia pasca tumbanganya Soeharto 1998 memungkinkan pilihan ini dapat diwujudkan. Dengan ratusan pejabat public yang harus dipilih melalui pemilihan langsung, bandul politik kini lebih banyak ditentukan oleh preferensi politik para pemilih.

Konsekuensi lebih lanjut dari situasi ini berupa lahirnya kebutuhan untuk memahami dinamika perilaku pemilih dan strategi yang tepat untuk menjangkau para pemilih ini. Dengan demikian politik tidak hanya dapat dikerjakan oleh para politisi tetapi juga mulai melibatkan apa yang oleh Dan Nimmo disebut sebagai *political pros*, para professional politik.⁴¹ Sifat kerja politik berubah menjadi sebuah pasar. Tidak mengherankan bila kemudian politik mengadopsi banyak model marketing yang berkembang dalam lingkungan bisnis dan pemasaran.

Dalam sebuah wawancara Denny J.A mengungkapkan, “Saya tak ingin lembaga riset hanya bergantung dari donor dan rasa baik hati lembaga asing atau pemerintah atau pengusaha besar. Saya ingin buktikan bahwa lembaga riset yang

⁴¹ Lihat Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, Penerbit Remaja Karya, 1989

kredibel bisa juga hidup dari masyarakat. Mau tidak mau, suka tidak suka, lembaga riset itu harus komersil. Public membeli jasanya. Namun public tak akan bersedia membeli jasanya jika kualitas risetnya dipertanyakan. Marketing dan iklan adalah bagian dari upaya menarik perhatian klien.”⁴²

Meski berorientasi profit, nilai rupiah tak selalu jadi pegangan utama Lingkaran Survei Indonesia dalam memilih klien. Hanya calon yang mendukung demokrasi dan pluralism, kata Denny, yang akan mereka dukung.

Berdasarkan porsi kepemilikan saham, Lingkaran Survei Indonesia dapat disebut sebagai milik Denny J.A, karena ia memegang saham jumlah saham paling besar. Bisa dimaklumi bila kemudian kiprah dan sepak terjang lembaga ini hampir identik dengan kiprah dan sepak terjang Denny J.A.

Sebuah Warisan di Cakrawala Demokrasi Indonesia

Denny J.A telah membawa tradisi baru dan sejumlah sumbangan penting bagi kehidupan politik dan demokrasi Indonesia. Pertama, ikut meletakkan dasar bagi bertumbuh, berkembang dan berfungsinya lembaga jajak pendapat sebagai pilar kelima yang menopang kekokohan demokrasi Indonesia. Kedua, menyumbang dan mendorong penerimaan yang luas terhadap survey opini public sebagai instrument penting dalam politik. Dalam kultur baru politik Indonesia, polling secara perlahan-lahan telah menjadi sesuatu yang tak dapat dibayangkan jika absen dalam kehidupan politik. Ketiga, dalam intensitas yang luar biasa, Denny J.A telah mentransformasi survey opini public dari arena nasional ke daerah. Keempat, membawa tradisi baru konsultan politik professional di Indonesia.

⁴² Majalah Men's Obsession, *op.cit*

Pengakuan atas berbagai sumbangan itu datang dari berbagai kalangan. Majalah *d'Maestro* menobatkannya sebagai *Man of the Year* untuk tahun 2007. Pengakuan juga diberikan MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia) berupa MIPI Award untuk kategori pemerhati pemerintahan.⁴³ Ryass Rasyid, seorang guru besar dalam Ilmu Pemerintahan berkaitan dengan pemberian MIPI Award tersebut mengatakan, "Denny J.A membawa tradisi baru dalam praktek ilmu pemerintahan. Survey opini public yang ia populerkan membantu pemerintah memahami aspirasi dan persepsi yang berkembang di masyarakat. Sementara profesi konsultan kampanye yang ia bawa ke Indonesia membuatnya ikut menjadi pemain penting dalam pemilu dan pilkada. Itu sebabnya ia mendapatkan penghargaan MIPI Award 2007."⁴⁴

Warisan seperti apakah yang ditinggalkan oleh semua sumbangan ini bagi kehidupan politik dan demokrasi Indonesia?

Pertama, kehadiran lembaga jajak pendapat sebagai pilar kelima akan membawa Indonesia kepada sebuah kehidupan demokrasi yang sebenarnya. Mengutip ilmuwan politik R.A. Dahl, sebuah Rezim disebut demokrasi apabila ia responsive terhadap aspirasi public. Sikap responsive itu terkait dengan partisipasi politik warga Negara untuk menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan public. Demokrasi tak terbayangkan tanpa partisipasi politik warga Negara. Demokrasi dengan demikian adalah sebuah rezim yang responsive terhadap tuntutan public yang muncul sebagai opini public. Dalam demokrasi,opini public itu digali melalui survey atau polling opini public.⁴⁵

⁴³ MIPI Award diberikan untuk pertama kalinya pada Agustus 2007 kepada sejumlah tokoh pada beberapa kategori. Kategori praktisi pemerintahan diberikan kepada Ali Sadikin (mantan Gubernur DKI Jakarta), H Jusuf Serang Kasim(Walikota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur), dan I Gede Wanasa (Bupati Jembrana, Provinsi Bali). Untuk kategori ilmuwan pemerintahan diberikan kepada Prof Dr Harun Alrasid SH (Guru Besar Universitas Indonesia)dan Prof Drs S Pamudji MPA (pendiri Institut Ilmu Pemerintahan)

⁴⁴ Website Lingkaran Survei Indonesia, www.lsi.co.id

⁴⁵ Saiful Mujani, *Demokrasi dan Polling Opini Publik*, makalah, 5 Februari 2004

Praktek survey dan polling opini public yang makin populer saat ini akan membantu Indonesia memiliki sebuah kehidupan politik yang berpusat pada warga negaranya. Dalam perspektif ini, para pemimpin yang demokratis adalah mereka yang mampu mengagregasi dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat, dan pada gilirannya memerintah berdasarkan opini public.

Ketika memberikan pengantar pada buku *Opini Umum*, edisi Indonesia karya Walter Lippmann *Public Opinion*, Mochtar Lubis menulis: Dalam setiap sistem demokrasi, suara mayoritas yang menentukan. Dan suara mayoritas selalu dikaitkan dengan opini umum. Tetapi walter Lippmann dan di samping banyak juga pemikir lain, bersikap kritis terhadap apa yang disebut sebagai opini umum ini. Benarkah apa yang dicap sebagai opini umum itu benar-benar mewakili pendapat mayoritas dalam sebuah masyarakat? Dan di mana dan bagaimana caranya mengukur apa yang disebut sebagai opini itu benar-benar adalah pendapat mayoritas masyarakat?⁴⁶

Kesangsian atau pertanyaan kritis yang disampaikan Walter Lippmann seperti yang dikutip Mochtar Lubis itu juga hidup di lingkungan politik Indonesia terutama di saat-saat awal praktek jajak pendapat ini berkembang. Hamzah Haz adalah contohnya. “Saya tidak mau dan tidak akan jadi presiden polling, “ katanya suatu ketika saat sedang bersaing di arena pemilihan presiden tahun 2004. Hasil survey menempatkan hamzah Haz yang berpasangan dengan Agum Gumelar itu di urutan paling bawah dalam perolehan suara.⁴⁷ Hasil pemilu 2004 membuktikan prediksi survey itu ternyata benar.

Terhadap kritik dan kesangsian seperti ini, Denny J.A punya jawaban. Melalui metodologi yang benar, survey opini public atau jajak pendapat dapat dianalogikan

⁴⁶ Lihat kata pengantar Mochtar Lubis dalam *Opini Publik*, walter Lippmann, Yayasan Obor Indonesia September 1998, hal.xiv

⁴⁷ “Pada Polling Kita (tak) Percay,” Koran Tempo, 4 Juli 2004

dengan satu kuah besar sup ayam. Hanya dengan mencicipi satu sendok dari sup itu, kita sudah dapat mengetahui rasa sup satu kuah itu.⁴⁸

Kedua, dinamika kehidupan yang demokratis itu akan berkembang luas dan merata di tingkat daerah. Denny J.A telah menyumbang secara signifikan bertumbuhnya kultur baru politik di daerah dengan mengembangkan *research based campaign*. Melalui Lingkaran Survei Indonesia, Denny J.A juga mendorong pemerintahan di daerah untuk lebih mendasarkan kebijakannya pada aspirasi public yang terekam secara akurat dan dapat diandalkan (reliable) dalam survey opini public. Dengan praktek ini, Denny J.A telah mendorong tradisi baru bagi pemerintahan daerah untuk tidak hanya menyertakan masyarakat di saat pemilu, melainkan yang lebih penting lagi melibatkan masyarakat dalam pemerintahan sehari-hari. Jika tradisi ini dirawat secara terus menerus maka sinisme public terhadap kelembagaan politik yang tidak dapat dipercayai akan berkurang. Syarul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Selatan yang kemenangannya dibantu Denny J.A mengakui "Saat demokrasi di Indonesia tengah mencari kedewasaan, sosok Denny J.A menjadi kebutuhan."⁴⁹

Ketiga, Denny J.A telah mengawali tradisi konsultan politik, sebuah tradisi yang secara perlahan-lahan akan menjadi bagian dari kehidupan politik Indonesia di masa depan. Jika kita merujuk pada pengalaman Amerika Serikat, maka kehadiran konsultan politik professional sesuatu yang tidak hanya tak dapat dihindari, melainkan sesuatu yang diperlukan (*inevitable, in fact necessary*) bagi kehidupan politik itu sendiri.

Tumbuh dan berkembangnya profesi ini merupakan sebuah kebutuhan, bahkan sesuatu yang tidak dapat dihindari, sebagai respons atas evolusi yang sedang terjadi dalam dunia, khususnya politik. Mengutip salah seorang konsultan politik

⁴⁸ Denny JA, *Memperkuat Pilar Kelima*, LKIS, 2006

⁴⁹ Pernyataan Limpo ini diambil dari Majalah d'Maestro edisi Desember 2007

Amerika Serikat, Faucheux, teknologilah, dan bukan para konsultan, yang mengubah politik. Kehadiran, pertumbuhan dan perkembangan teknologi komunikasi seperti radio dan televisi, telah tumbuh beriringan dengan kehadiran praktek konsultan politik dalam ruang politik AS. Kehadiran para konsultan politik ini mengimbangi secara kuat fungsi partai sebagai pusat dari keseluruhan aktivitas politik.⁵⁰

Di Indonesia tradisi ini baru berada pada tahapan pertumbuhan awal, belum sematang dan semasif apa yang berlangsung di Amerika Serikat. Seperti apa jangkauan pengaruh kualitatif dari kelahiran tradisi baru ini masih terlalu dini untuk diajukan. Namun, yang pasti Denny J.A telah ikut menyumbang dua tradisi penting yang dari waktu ke waktu terus berkembang menjadi sesuatu yang integral dengan kultur baru kehidupan politik Indonesia: survey politik opini public dan profesi konsultan politik professional.

Kehadiran professional politik meneguhkan kultur baru Indonesia yang dapat disebut sebagai *research based politics*. Kini politik adalah sebuah aktivitas atau tindakan rasional yang bertumpuh pada pemahaman yang factual berdasarkan riset serta, mentransformasikan semua pemahaman tersebut ke dalam strategi pemenangan kandidat yang solid. Proses politik kini, untuk sebagian, menjadi milik para professional politik, bukan lagi sepenuhnya milik para politisi yang berinsting tajam.

“Ombak memecah malam di pantai Kalasey, Manado, Sulawesi Utara. Di salah satu meja dalam restoran Ria-Rio di bibir pantai itu, analis politik Denny J.A berbincang serius dengan Jimmy Rimba Rogi, kandidat Walikota Manado. Malam itu, Denny memberikan aneka jurus demi mendongkrak popularitas kader Partai Golkar tersebut. Ia juga menyodorkan kiat-kiat memenangkan pilkada yang akan digelar pada 21 Juli 2005. Jimmy tampak menyimak dengan takzim.”

⁵⁰ Michael Rust, *The Growing Role of Political Consultants*, artikel 1994.

Begitulah Majalah Tempo⁵¹ melukiskan sosok Denny Januar Ali, doctor ilmu politik lulusan Ohio State University, Amerika Serikat, kelahiran Palembang 4 Januari 1963., selaku seorang konsultan politik professional. Pada 21Juli 2005, Jimmy Rimba Rogi berhasil memenangkan Pilkada. Bersama dengan kemenangan Jimmy di tahun 2005 itu dan puluhan kandidat lain setelah Jimmy, Denny J.A telah meninggalkan sebuah jejak sejarah, yang akan terpateri jauh dan mendalam pada kehidupan politik dan demokrasi Indonesia baik kini maupun di masa depan.

There is nothing so powerful as an idea whose time has come. Denny J.A suka menyitir kalimat sastrawan Victor Hugo itu. Ide yang datang dan diwujudkan di saat yang tepat itu menghasilkan sejarah. Semua orang pada hakikatnya berada di tengah gelombang sejarah, namun hanya sedikit orang yang memilih membuat sejarah. Seorang Denny Januar Ali telah memilih untuk tidak hanya berdiri di tepian gelombang sejarah itu, melainkan ikut membuat sejarah. Apakah sejarah itu menghasilkan riak yang besar atau kecil, waktulah yang akan mengatakannya.

⁵¹ Majalah Tempo, edisi 12 Juni 2005, dalam artikel "Jualan Data di Pilkada"